

# Gejolak di Sabah dan Sarawak, Serta Implikasinya Terhadap Indonesia\*

Stepanus Djuweng

... the colonial status of Sabah and Sarawak would not change through Malaysia -- the only thing that would change is the transfer of the Colonial office from London to Kuala Lumpur ..."

Soekarno

(Seperti dikutip kembali oleh Dr. Jeffrey G. Kitingan, Ketua Yayasan Sabah dan Direktur Eksekutif Institute for Development Studies (IDS) Sabah dalam pernyataan pers di Kota Kinibalu 4 Maret 1991)

**M**ESKIPUN Sabah dan Sarawak telah merdeka dan menjadi bagian dari federasi Malaysia lebih dari seperempat abad, tetapi hubungan *Federal-States* hampir tidak pernah sepi dari berbagai gejolak. Situasi ini setidaknya membawa dua implikasi utama. *Pertama*, dalam konteks internal Malaysia, baik stabilitas maupun instabilitas kawasan Sabah dan Sarawak akan mempengaruhi keutuhan Federasi Malaysia. *Kedua*, Sabah dan Sarawak merupakan titik temu (*center point*) dari empat ang-

gota ASEAN -- Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Indonesia. Ini berarti stabilitas atau instabilitas di kawasan itu akan menjadi faktor penentu situasi di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak, yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, akhirnya menyetujui pembentukan Federasi Malaysia bersama Singapura dan Federasi Semenanjung Malaya berdasarkan rekomendasi dari *Cobbold Commission* dengan syarat, "Malaysia should be regarded by all concerned as an association of partners, combining in the common interest to create a new nation but retaining their own

\*Makalah ini disajikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh CSIS di Jakarta, pada tanggal 7 November 1991.

individualities ...? (Luping, 1988).

### Situasi di Sabah dan Sarawak Dewasa Ini

Setelah lebih dari 25 tahun pasca-*Malaysia Day*, integritas kebangsaan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaya masih merupakan tantangan utama yang dihadapi Federasi Malaysia. Bagian berikut ini memberikan gambaran mengenai situasi politik, ekonomi, sosial-budaya di Sabah dan Sarawak.

#### Situasi Politik

Kondisi politik, sosial dan budaya di Sabah-Sarawak berbeda dengan di Semenanjung Malaya. Dari segi komposisi etnis, di Semenanjung terdapat dua kelompok yang dominan: Melayu (bumiputera) dan Cina (nonbumiputera). Kelompok bumiputera beragama Islam yang merupakan agama Negara. Mereka secara konstitusional memiliki hak-hak istimewa -- *Malaya Paramountcy* -- yang tidak dimiliki oleh kaum nonbumiputera. Karena bumiputera Melayu beragama Islam, maka bumiputera identik dengan Melayu dan Islam. Di Sabah dan Sarawak terdapat tiga kelompok dominan, yakni bumiputera non-Muslim merupakan kelompok mayoritas, menyusul masyarakat keturunan, dan bumiputera muslim sebagai kelompok minoritas.

Gejolak di Sabah dan Sarawak merupakan implikasi dari kegagalan Kuala Lumpur dalam mengatasi perbedaan antara Sabah-Sarawak di satu pihak dan Semenanjung di pihak lainnya. Penyebab yang paling menonjol dari gejolak tersebut antara lain pe-

maksaan Federal terhadap Sabah-Sarawak untuk menerima konsep "kemalaysiaan": ketuanan puak Melayu, bahasa Melayu dan Agama Islam sebagai agama negara. (Liegh, 1974; Wariya, 1988)

Konflik yang terjadi saat ini diawali oleh kemenangan *Parti Bersatu Sabah* (PBS) yang dipimpin Datuk Joseph Pairin Kitingan merebut 25 dari 48 kursi *Dewan Undangan Negeri* (DUN = *State Legislative Assembly*) pada Pemilu 1985. Sisanya terbagi antara *United Sabah National Organisation* (USNO) di bawah Tun Mustapha Datu Harun 16 kursi, *Berjaya*, partai berkuasa dipimpin oleh Datuk Harris Salleh, yang sebelumnya menguasai 44 kursi DUN, melorot menjadi 6 kursi, serta Pasok 1 kursi. Pasok kemudian bergabung dengan PBS, sehingga kursi PBS menjadi 26 kursi. Tun Mustapha, atas dukungan Harris Salleh, memaksa Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk melantiknya menjadi Ketua Menteri. Namun 11 jam kemudian, atas saran PM ad interim Datuk Musa Hitam, Joseph Pairin Kitingan dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah.

Selain membawa kasus itu ke pengadilan, Mustapha juga memobilisasi para pendukungnya berdemonstrasi di sejumlah kota. Provokasi itu sempat menimbulkan ledakan bom di Kota Kinabalu dan Sandakan. Ia berharap agar pemerintah Federal memberlakukan keadaan darurat di Sabah, sehingga PM Malaysia memiliki kekuasaan untuk mengambil alih pemerintahan negara bagian itu. Apabila ini terjadi, Harris atau Mustapha akan mudah kembali ke puncak kekuasaan.

Untuk meredakan ketegangan, PM Mahathir mengusulkan pembentukan pemerintahan koalisi PBS-USNO-Berjaya. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu me-

mutuskan bahwa pelantikan Mustapha batal secara hukum dan Pairin adalah Ketua Menteri Sabah yang sah. Pairin menolak usulan Mahathir. Menurut Pairin, untuk memecahkan persoalan Sabah, partai-partai harus kembali kepada rakyat guna meminta mandat baru. Pairin kemudian membubarkan DUN dan menetapkan Pemilu tanggal 5-6 Mei 1986. Hasilnya, PBS memperoleh 34 dari 48 kursi DUN, sementara perolehan USNO 12, dan Berjaya satu kursi, serta *Sabah Chinese Consolidated Party* (SCCP) satu kursi, yang kemudian bergabung dengan PBS.

Kokohnya legitimasi kekuasaan Joseph Pairin Kitingan dipandang Federal sebagai penyimpangan dari skenario dan norma politik Malaysia: Pairin beragama Katolik, sementara PBS partai yang bukan anggota Barisan Nasional. Ini berarti akan menghambat proses malaysianisasi yang sedang berlangsung di Sabah. Mahathir sendiri telah berusaha maksimal untuk mencegah kejadian ini. Dalam kampanye Pemilu 1985, Mahathir berjanji kepada rakyat Sabah untuk "sink and swim with Harris Salleh and Berjaya."

Di sisi lain kemenangan PBS adalah cermin kehendak politik rakyat Sabah yang enggan didikte terus-menerus oleh Kuala Lumpur baik secara langsung maupun lewat *proxy-proxy*-nya di Sabah. Seperti dicatat oleh Rafaele (1986), Larson (1976) dan Luping (1988), berkuasanya USNO dan Berjaya di Sabah adalah atas kehendak dan campur tangan politik Pemerintah Federal. Sebagai imbalannya, kedua pemerintahan terdahulu itu terpaksa tunduk pada kemauan Federal. Pada masa Tun Mustapha berkuasa, beberapa bagian dari Konstitusi Sabah yang berkenaan dengan agama Islam, Bahasa Malaysia dan pendidikan "disesuaikan"

dengan Konstitusi Federal. Sementara pada masa Harris Salleh, P. Labuan diserahkan kepada Kuala Lumpur, dan konsesi pengeksploitasian minyak diberikan kepada Petronas. Sabah hanya mendapatkan royalti sebesar 5%. Selanjutnya kawalan Sabah terhadap urusan imigrasi juga diserahkan sepenuhnya kepada Federal.

Dukungan rakyat Sabah terhadap PBS tidak lain karena PBS secara lantang melansir isu-isu sentral berupa pengembalian hak-hak Sabah yang tertuang dalam *The Twenty Points* (TTP). Dokumen itu berisi 20 perkara mengenai hak-hak khusus rakyat dan negeri Sabah yang, menurut *The Agreement of the Federation of Malaysia (Malaysia Agreement)*, akan dilindungi oleh konstitusi Federasi Malaysia. Ini adalah konsesi terakhir yang diberikan oleh para pemimpin Sabah sebelum terbentuknya Federasi Malaysia. Oleh karena itu, TTP dianggap sebagai *Magna Charta* atau *Constitutional Safeguards* bagi kemerdekaan Sabah dalam Federasi Malaysia.

Tanggal 3 Januari 1987, Dr. Jeffrey G. Kitingan, Ketua Yayasan Sabah dan Direktur Eksekutif *Institute for Development Studies* (IDS) -- lembaga penyelidikan yang merupakan *think-tank* PBS -- secara resmi menyuarakan kembali tuntutan-tuntutan Sabah kepada Federal. Selain itu, Jeffrey juga mengeluh bahwa tindakan penyimpangan pemerintah Federal dari TTP adalah sumber ketidakpuasan rakyat Sabah.

Menanggapi hal itu pemerintah Federal agaknya enggan berkompromi. Menurut Jeffrey, PM Mahathir malah menasihatinya, "Jeffrey, these state rights and the 20 points, the kampung people do not know about them, why should we tell them? Special Branch (intel khusus) reports say

that you and IDS are responsible for informing the people ..." Selain itu, "Pemerintah Federal sudah berbaik hati dengan memberikan royalti sebesar 5% kepada Sabah dan Sarawak" (*Sabah Time*, 4 Maret 1990).

Perselisihan Sabah-Federal ini semakin diperburuk oleh manuver politik kalangan oposisi di Sabah yang menuduh Pemerintah PBS anti-Islam dan menyebarkan agama Kristen. Padahal, tahun 1990 Pemerintah memberikan bantuan sebesar M\$18 juta kepada MUIS (Majelis Ulama Islam Sabah).

Bulan Januari 1990, Dr. Jeffrey dituduh terlibat lebih dari 30 tindakan korupsi. Menjelang Pemilu Negara Bagian itu, Juli 1990, empat orang tokoh masyarakat Sabah juga ditahan tanpa proses pengadilan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA = *Internal Security Act*). Mereka dituduh bermaksud membawa Sabah keluar dari Federasi Malaysia. Menurut sejumlah pemerhati politik, kejadian-kejadian itu mengisyaratkan agar rakyat Sabah melepaskan dukungannya terhadap PBS.

Tekanan-tekanan Federal malah membuat PBS semakin vokal dalam menuntut hak-hak rakyat dan negeri Sabah. Dalam kampanye Pemilu Negara Bagian Juli 1990, PBS menyatakan akan meninjau kembali hubungannya dengan Federal, sesuai dengan *The Twenty Points*. Selain itu Pairin juga berjanji akan berjuang di Parlemen Federal untuk menghapus ISA, meminta diperbolehkannya Sabah memiliki pemancar radio dan televisi serta didirikannya Universitas Sabah. Ia juga meminta agar Pemerintah Federal memberikan pembagian royalti minyak hingga 50%, mengembalikan P. Labuan dan memberikan wewenang kepada Sabah untuk mengontrol keimigrasian.

Hasil Pemilu 1990 adalah 36 kursi bagi

PBS dan 12 kursi bagi USNO. Seharusnya Kuala Lumpur memperhatikan indikasi bahwa rakyat Sabah menghendaki pendekatan yang lebih lain dari yang telah mereka terima selama lebih dari seperempat abad terakhir sejak berdirinya Federasi Malaysia. Namun para pejabat Federal malah menuduh PBS telah meracuni pikiran rakyat Sabah untuk memusuhi Federal.

Pada gilirannya, Pairin melakukan tindakan yang paling kontroversial lewat keputusannya untuk keluar dari Barisan Nasional dan bergabung dengan oposisi lima hari sebelum Pemilu Federal Oktober 1990. Mahathir melukiskan tindakan ini sebagai "tikaman dari belakang" terhadap Barisan Nasional. Wakil Ketua UMNO Gafhar Baba melakukan kampanye di Sabah agar rakyat mendukung USNO yang merupakan komponen BN. Tetapi seperti dugaan semula, PBS berhasil merebut 14 kursi parlemen.

Selepas Pemilu itu, para pemimpin USNO mendesak Kuala Lumpur untuk memberikan pelajaran kepada PBS. Menteri Keuangan Datuk Paduka Zaim Zainuddin selanjutnya menyatakan akan meninjau kembali anggaran belanja dan subsidi Federal kepada Sabah. Menurut data statistik, Federal grant kepada Sabah (1990) adalah M\$303,7 juta, sementara dalam tahun anggaran 1991 hanya M\$170,9 juta.

Pemerintah Federal kemudian mencopot Pairin dari *Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negeri* yang beranggotakan Inspektur Kepolisian, Kepala Imigrasi, Panglima AB, Pimpinan RTM dan *State Secretary*. Sebagai gantinya, Kuala Lumpur menciptakan jabatan baru, yakni *Federal Secretary*. Selanjutnya, Pairin juga dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Negeri. Badan yang beranggotakan Men-

teri dan Wakil Menteri, Kepala-kepala Kantor Federal di Sabah ini bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian proyek-proyek pusat dengan proyek-proyek Negara Bagian. Sebagai penggantinya dibentuklah Kantor pembangunan Persekutuan Cabang Sabah. Terhadap hal itu Pairin mengatakan, "Kami pada pokoknya menyambut baik usaha-usaha itu, meskipun pembentukannya bermotif politik".

Pada bulan Januari 1991, Dr. Maximus Ongkili, Wakil Ketua IDS, dan Sekretaris Pers, Pairin, ditahan berdasarkan ISA. Ia dituduh bermaksud membawa Sabah keluar dari Persekutuan. Dua hari kemudian Datuk Pairin ditangkap atas tuduhan korupsi dengan cara memenangkan tender pembangunan gedung dan jalan serta memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang pemegang sahamnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya antara 1985-1987.

Ketika berkampanye untuk mendukung calon UMNO pada Usukan *by election* -- sebagai akibat mundurnya Tun Mustapha dari DUN karena bergabung dengan UMNO -- Gafhar Baba mengatakan UMNO ke Sabah adalah untuk memberikan "pelajaran" kepada PBS yang anti Islam, rasialis dan anti Federal. Pilihanraya kecil 11 Mei 1991 dimenangkan oleh Tun Mustapha (UMNO). Namun *test-case* ini belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari persepsi rakyat Sabah terhadap UMNO. Sebab konstituensi Usukan memang basis politik tradisional Tun Mustapha sejak masih di USNO.

Di Sabah terdapat 48 daerah pemilihan (*Constituency*). Etnik Kadazan berkisar 38% dari penduduk lokal. Mayoritas mereka bermukim pada 22 konstituensi. Dalam

bahasa politik, konstituensi ini disebut *Kadazan Majority Constituency* (KMC). Keturunan Cina 27%, secara mayoritas bermukim di 8 *Chinese Majority Constituency* (CMC), dan kelompok Muslim sekitar 25%, mayoritas bermukim di 18 *Malay-Muslim Majority Constituency* (MMC). Sisanya sekitar 11% kelompok lain-lain yang tersebar di seluruh negeri.

Jika PBS partai kelompok Kristen-Kadazan, maka distribusi normal perolehan kursi PBS adalah 22 kursi, USNO 18, partai Cina 8 kursi. Kenyataannya, PBS mendapat dukungan 36 kursi. Ini berarti, selain didukung oleh semua KMC (22 kursi), PBS juga didukung oleh semua CMC (8 kursi) dan 6 dari 18 kursi MMC. Dengan demikian, PBS adalah partai multi-rasial. Dalam pada itu, dari 9 Dewan Menteri, 5 Kadazan, 2 Cina dan 2 Muslim. Masing-masing seorang Kadazan, Cina dan Muslim menjabat sebagai Wakil Ketua Menteri. Asisten Menteri Terdiri dari 5 Muslim, 4 Kristen-Kadazan dan 3 Cina.

Ini berarti bahwa PBS didukung kelompok-kelompok dominan di Sabah, sehingga usaha-usaha Kuala Lumpur untuk melemahkan partai itu tampaknya tidak gampang. Perkembangan terakhir adalah ditahannya Dr. Jeffrey G. Kitingan di bawah ISA. Ia yang telah menjadikan dirinya simbol perlawanan Sabah terhadap Federal dituduh membahayakan keselamatan negara. Jeffrey antara lain dituduh oleh Pemuda UMNO bersekongkol dengan gerakan Zionist Asia Pasifik yang berbasis di Australia untuk menumbangkan pemerintahan PM Mahathir. Gerakan Zionist itu, menurut Pemuda UMNO, menginginkan kejatuhan Mahathir karena Malaysia berpihak kepada Irak selama Perang Teluk Persia. Tuduhan ini sebenarnya merupakan *counter attack* terhadap sikap LSM dan Pers Australia yang menuduh

Mahathir sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan tropis di Sabah dan Sarawak serta pelanggaran terhadap hak asasi kaum pribumi di kedua negara bagian Borneo itu.

Keberhasilan PBS di Sabah menurut para analis akan memberikan inspirasi kepada kelompok pribumi non-Muslim di Sarawak untuk merebut kembali tampuk Pemerintahan yang pernah mereka kuasai selama 7 tahun (1963-1970). Komposisi penduduk Sarawak terdiri dari etnik Dayak 44%, Cina 30% dan Melayu-Melanau 25% serta lain-lain 1%. Di atas kertas, tidak sulit bagi etnik Dayak Sarawak untuk menguasai pemerintahan negara bagian itu.

Namun, masyarakat Dayak Sarawak secara tradisional terbagi dalam beberapa partai. Kelompok Bidayah pada umumnya mendukung *Sarawak National Party* (SNAP) dan *Sarawak United People's Party* (SUPP). Sedangkan sebagian kelompok Iban mendukung SNAP dan *Parti Pesaka* -- yang kemudian berfusi dengan *Parti Bumiputera* -- menjadi *Parti Pesaka Bumiputera* (PBB).

Ketua Menteri Sarawak yang pertama, Stephen Kalong Ningkan adalah pendiri dan presiden SNAP. Selepas krisis politik Sarawak 1966, kepemimpinan partai diserahkan kepada Datuk Amar James Wong. Sejak itu para pemimpin Dayak di SNAP tidak pernah menduduki kursi Presiden Partai.

*Pesaka* dipimpin oleh Tumenggong Tun Jugah -- *Iban Traditional Chief* dari Saribas. Setelah partai itu berfusi dengan *Parti Bumiputera* yang dipimpin oleh Abdul Rahman Ya'akub dari suku Melanau-Muslem, Jugah mengundurkan diri dari arena politik. Seperti halnya para pemimpin Dayak di SNAP, para pemimpin sayap *Pesaka* di PBB juga tidak pernah menduduki kursi kepemimpinan

an partai. Dengan demikian sulit bagi Dayak Sarawak untuk meraih puncak tertinggi per-caturan politik negeri itu.

Maka jadilah orang Dayak sebagai *minority in majority*. Kelompok besar dalam bilangan statistik, tetapi tidak memegang kendali dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Kondisi ini tidak memberikan kepuasan kepada sejumlah pemimpin Dayak di SNAP. Setelah gagal merebut kepemimpinan partai dari Datuk Amar Jame Wong pada Konferensi Partai 1983, Datuk Leo Moggie Anak Irok (Wakil Presiden SNAP) dan Datuk Daniel Tajem Anak Miri mendirikan *Parti Bangsa Dayak Sarawak* (PBDS). Oleh Ketua Menteri Datuk Taib Mahmud, PBDS kemudian diterima dalam koalisi BN Negara Bagian. Dalam Pemilu 1983, PBDS berhasil merebut 5 dari 13 kursi yang sebelumnya dikuasai oleh SNAP (Jayum, 1988).

Pada awal 1987, masyarakat Dayak Sarawak yang tinggal di daerah pedalaman mengadakan aksi protes terhadap perusahaan penebangan kayu. Blokade selama 3 bulan berlangsung di 12 tempat terpisah. Kondisi ini telah menyebabkan krisis politik di Negara Bagian itu, karena sebagian besar dari konsesi hutan ternyata dimiliki oleh para politisi. Di bawah pimpinan Daniel Tajem yang menjabat sebagai Wakil Ketua Menteri, 28 dari 48 Anggota Dewan Undangan Negeri menyatakan mosi tidak percaya kepada Abdul Taib Mahmud. DUN kemudian dibubarkan untuk mendapatkan mandat baru dari rakyat lewat pemilu.

PBDS menandatangani kerja sama dengan *Parti Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak* (Permas), yang baru dibentuk oleh Abdul Rahman Ya'akub, mantan Ketua Menteri dan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, dan paman dari Abdul Taib Mahmud.



Sementara PBDS berhasil meraih 15 kursi, Permas hanya mendapatkan 5 kursi. Dengan demikian BN3 memperoleh 28 kursi; PBB 14, SNAP 3, dan SUPP 11. PBDS lantas menjadi partai oposisi. Sampai dengan Juni 1989, 8 dari anggota DUN PBDS telah menyeberang ke pihak Pemerintah. Ini adalah salah satu usaha untuk melumpuhkan partai itu.

Menurut Sidi Munan, Sekretaris Eksekutif PBDS, pada Pemilu Sarawak 1991 ini PBDS akan meraih sekurang-kurangnya 25 kursi. Dari jumlah itu, menurut Munan, "16 seats are already in hand". Ini didasarkan atas perhitungan bahwa PBDS memenangkan 8 *Parliamentary Constituency* pada Pemilu Federal 1990 lalu. Satu Konstitusi Parlemen terdiri dari 2 konstitusi Dewan Undangan Negeri.

Meskipun prediksi tadi didasarkan atas perhitungan politis yang cukup beralasan, tetapi agaknya PBDS terlalu optimistis. Sejumlah aktivis LSM dan para pengacara beranggapan bahwa para pemimpin PBDS kurang merakyat. Seorang aktivis LSM di Miri, juga berpendapat bahwa PBDS tidak secara serius memperjuangkan nasib masyarakat Dayak yang merupakan basis politik mereka. Selebihnya, kekalahan PBDS karena mereka masih menggunakan pola lama, "winning the Dayak Traditional Chiefs" (Searle, 1983). Dengan berkembangnya kesadaran politik rakyat, formula itu agaknya tidak seampuh dulu lagi.

Di sisi lain, bagi masyarakat Dayak di pedalaman, mempertahankan tanah dan hutan yang merupakan pilar utama perekonomian mereka jauh lebih mendesak daripada mengurus kepentingan para elit politik di Kuching. Mereka beranggapan setelah terpilih, politisi biasanya meninggalkan rakyat.

Hal ini juga terungkap dalam pernyataan seorang pakar pada Broken Hill, "We need a leader, not a politician. A leader gives the power to the people, while a politician takes the power from the people".

Beberapa hal yang dapat dicatat dari realitas politik di Sabah dan Sarawak adalah sebagai berikut:

1. Konsentrasi kekuasaan yang sesungguhnya berada di Kuala Lumpur. Ini terbukti dengan adanya campur tangan Federal dalam menggeser Stephen Kalong Ningkan dan Tawi Sli di Sarawak (1966 dan 1970), serta Donald Stephens di Sabah (1964). Mereka diganti dengan Ketua Menteri Muslim yang dinilai seaspirasi dengan para pemimpin Federal;
2. Sejak semula kekuatan politik Dayak di Sarawak terbagi ke dalam SNAP, Pesaka, SUPP; kemudian SNAP, PBB dan SUPP dan terakhir SNAP, PBB dan PBDS. Perpecahan di kalangan elit politik ini berimplikasi pada rapuhnya persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Dayak di tingkat basis;
3. Rasa persatuan di kalangan etnik Kadazan sangat kokoh, sebagai akibat dari kerasnya tekanan-tekanan dari Pemerintah Sabah terdahulu. Sementara Pemerintah Sarawak lebih toleran terhadap masyarakat Dayak, sambil mengamalkan strategi "pecah dan perintah";
4. PBS adalah multirasial, dan politisi Kadazan berhasil membangun mesin politik mereka. Sementara politisi Dayak di Sarawak tidak berhasil merebut kepemimpinan partai-partai yang ada. Membentuk Partai Dayak secara eksklusif berarti meninggalkan kelompok lain dalam urusan politik dan kenegaraan di negeri yang

multirasial. Di pihak lain, tidak semua pemimpin Dayak bergabung dengan partai Dayak;

5. Kelompok etnik Cina menempati *king marker position*. Kekuasaan di Sabah dan Sarawak sangat tergantung pada dukungan etnik keturunan Cina, sebab *Moslem Majority Constituency* seimbang dengan *Non Moslem Bumiputera majority Constituency*.

Dengan demikian, tidak mengherankan apabila PBDS, dalam Pemilu Oktober 1991 lalu hanya berhasil meraih 7 dari 56 kursi yang diperebutkan. Faktor lain kekalahan PBDS adalah karena sikap ambiguitas Presiden PBDS, Leo Moggie ak Irok yang tidak terjun ke arena pemilu. Selain bekerja sebagai anggota Parlemen Federal, Leo juga menjabat Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Federal. Karena itu untuk bertanding dalam Pemilu Sarawak, ia harus melepaskan kedua jabatannya itu. Sikap dualisme PBDS sesungguhnya sudah tercermin dari statusnya yang berposisi di Sarawak tetapi pada saat yang sama menjadi anggota BN di Federal.

### Situasi Ekonomi

Sabah dan Sarawak adalah negara bagian yang kaya minyak dan kayu. Pembagian royalti minyak yang tidak seimbang antara *Federal-States* adalah sumber konflik tersendiri pada skala *Federal-States Relations*. Sementara itu, sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan masyarakat keturunan Cina yang berkolaborasi dengan elit politik merupakan sumber konflik internal. Contoh konkret adalah munculnya gerakan masyarakat pedalaman dalam menentang operasionalisasi perusahaan peme-

gang HPH sejak 1987. Gerakan itu kemudian menjadi masalah internasional dengan muncul dukungan dari berbagai NGO di dunia. Ekornya, 16 orang ditahan di bawah ISA dan ratusan lainnya dihadapkan ke pengadilan. Namun hal ini justru semakin mempertinggi intensitas gerakan oposisi tersebut, dan memperluas dukungan NGO terhadap perjuangan masyarakat pedalaman.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama lebih dari 25 tahun, namun Sabah dan Sarawak relatif lebih ketinggalan dibandingkan dengan Semenanjung Malaya. Keduanya hanya mendapatkan 5% dari royalti minyak bumi yang merupakan penghasilan utama. Di pihak lain, royalti HPH yang selama ini merupakan komponen pendapatan utama sudah semakin berkurang. Ini berakibat pada penurunan pendapatan Sabah dan Sarawak.

Total pendapatan asli Sabah menurun dari M\$1.272,1 juta (1990) menjadi hanya M\$1.011,8 juta pada tahun 1991. Komponen penurunan terbesar adalah dari sektor Federal grant dari 303,7 juta ringgit menjadi 170,9 juta ringgit. Di pihak lain, pendapatan Federal dari Sabah mengalami kenaikan dari M\$1.800 juta menjadi M\$1.850 juta pada periode yang sama. Bila diukur dari patokan tahun 1990, total pendapatan yang dikeruk dari Sabah adalah M\$3.072,1 juta. Dari angka itu, *Federal-State revenue sharing* adalah 58,60% : 41,40%. Bila dikurangi dengan *federal grant*, perbandingan itu akan menjadi 48,60 : 51,40. Ini berarti bahwa kekayaan Sabah yang masuk Kas Federal adalah 48,60%. Yang tidak terungkap adalah belanja Federal untuk Sabah pada tahun yang sama. Terdapat sekitar 20.000 pegawai Federal di Sabah, dan 90% daripadanya berasal dari Semenanjung Malaysia. Ini juga



menyebabkan kecemburuan sosial bagi Sabah.

*Malaysia Agreement* menyebutkan bahwa 40% pendapatan Federal yang diperoleh dari Sabah akan dikembalikan ke Sabah. Pada kenyataannya (1990) yang dikembalikan hanya sebesar 16,88%. Sementara pengangkatan pegawai Federal yang berasal dari Semenanjung menyalahi ketentuan tentang Borneonisasi, bahwa pegawai-pegawai Inggris hendaknya diganti dengan putra Sabah.

Meskipun pendapatan per kapita di Sabah lebih tinggi sekitar M\$430 daripada Sarawak, tetapi tingkat kemiskinan di Sarawak lebih rendah sekitar 10,6%. Dengan kata lain, tingkat pemerataan di Sarawak jauh lebih tinggi daripada di Sabah.

Di sisi lain, beberapa LSM di Sabah menyebutkan adanya sejumlah gedung sekolah rendah di pedalaman yang masih beratap daun dan berdinding bambu. Hal ini tidak akan dijumpai di Sarawak. Dengan demikian, Sabah adalah negeri kaya, tetapi rakyatnya miskin. Segi lain adalah biaya hidup di Sabah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Sarawak dan Semenanjung Malaya; air dan listrik, misalnya, masing-masing berbeda 30% dan 50% dibandingkan di Kuala Lumpur.

### *Situasi Sosial Budaya*

Kondisi lain yang merupakan beban bagi Sabah adalah pendatang gelap dari Indonesia dan Filipina. Menurut laporan riset IDS, terdapat sekitar 335.500 pendatang Filipina di Sabah (1988). Sejumlah 70.000 di antaranya adalah pengungsi bangsa Moro. Dari jumlah total di atas, 167.936 orang adalah

angkatan kerja, yang bekerja baik pada sektor formal maupun nonformal. Namun hanya sekitar 50.000 orang yang memiliki Surat Izin Kerja. Sisanya adalah pekerja/pendatang tidak resmi. Pada tahun yang sama pendatang dari Indonesia berjumlah 145.000 (sekarang ditaksir 150.000), bekerja di sektor formal maupun nonformal. Sebanyak 102.680 orang telah memiliki Surat Izin Kerja.

Para imigran ini selain menyerobot kesempatan kerja bagi penduduk setempat juga menyerobot pelayanan umum lainnya. Tahun 1987, perbandingan jumlah buruh dari luar dan dari penduduk lokal adalah 227.936 : 143.038. Pada tahun yang sama angka pengangguran di Sabah 11,4%. Sementara itu, 32,1% dari pasien rumah sakit yang diopname adalah para pendatang baik dari Filipina maupun dari Indonesia.

Begitu pula dalam sektor pendidikan. Sebanyak 28.527 orang dari 216.551 siswa sekolah rendah adalah anak keturunan imigran. Angka ini dua kali lebih besar dibandingkan pada tahun 1980. Pada periode yang sama angka pertambahan anak SR (Sekolah Rendah) dari penduduk lokal hanya sebesar 5,1%.

Yang mencemaskan penduduk setempat adalah -- bila arus imigran dan angka kelahiran dari kalangan mereka tidak ditekan -- maka dari 2.863.669 penduduk Sabah pada 2008, 51,7% adalah imigran dan atau keturunan imigran. Anehnya, sejak sensus penduduk 1986 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Federal, para imigran ini digolongkan sebagai bumiputera. Sekitar 85% dari mereka adalah penganut Islam, dan sisanya terbagi dalam berbagai kepercayaan.

Berbeda dengan di Sabah, masalah pendatang haram kurang menonjol di Sarawak.

Di Kuching tidak terdapat pedagang kaki-lima, pedagang asongan, tukang semir sepatu dan pengemis. Di Kota Kinabalu kondisi ini merupakan bagian dari denyut kehidupan kota itu.

### Federal-States Relations: Sejarah dan Implikasinya

Konflik antara Sabah-Sarawak dengan Semenanjung dimulai sejak dicetuskannya ide pembentukan Federasi Malaysia. Bagian tulisan berikut ini memberikan kronologi peristiwa-peristiwa yang mengarah pada timbulnya konflik tersebut.

#### Proposal Malaysia

Pada masa penjajahan Inggris, Semenanjung Malaya, Singapura, Sabah, Brunei dan Sarawak masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Tanggal 31 Agustus 1957 Federasi Malaya memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Tunku Abdul Rahman, Ketua *United Malay National Organisation* (UMNO) dan Presiden *Malayan Alliance* -- UMNO, *Malayan Chinese Association* (MCA) dan *Malayan Indian Congress* (MIC) -- menjadi Perdana Menteri Federasi itu. Sementara itu, Singapura memiliki otonomi terbatas pada tahun 1959 di bawah David Marshall. Pada Pemilu pertama Singapura, Lee Kuan Yew dari PAP berhasil menang, dan ia diangkat sebagai *Chief Minister*. Akibat tekanan Komunis di Singapura, Lee Kuan Yew berpendapat bahwa masa depan Singapura hanya akan terjamin bila bergabung dengan Federasi Malaya.

Tunku tidak setuju penggabungan itu. Pertama, mayoritas penduduk Singapura

adalah Cina, dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi dari masyarakat Malaya. Kedua, jumlah penduduk Cina Singapura dan Malaya melebihi jumlah penduduk Melayu. Dengan demikian, masa depan *Malay Paramountcy* akan terancam. Untuk itu, Tunku mengusulkan kepada Inggris agar Sabah, Sarawak dan Brunei dimasukkan ke dalam proposal Federasi yang baru itu; dan, usulan ini juga disetujui oleh Inggris. Maka pada konferensi pers di Singapura tanggal 27 Mei 1961, Tunku mengumumkan rencana pembentukan Federasi Malaysia.

Menurut Luping (1988) pernyataan Tunku disambut hangat oleh Malaya dan Singapura, dan sebaliknya ditanggapi dengan penuh keraguan di Sabah, Brunei dan Sarawak. Donald Stephens, *Huguan Siou* (Pemimpin Tertinggi) Suku Kadazan, Azhari, Ketua *Parti Rakyat Brunei*, dan Ong Kee Hui, Ketua *Sarawak United People's Party* membentuk *United Front* untuk menentang Federasi Malaysia. Ide itu bertentangan dengan cita-cita rakyat dan pemimpin di kawasan Borneo itu. Mereka bercita-cita untuk mendapat kemerdekaan sendiri. Jika harus membentuk Federasi, maka yang lebih masuk akal adalah membentuk *The Federation of Borneon States*, daripada harus bergabung dengan Semenanjung Malaya. Tantangan lain muncul dari Soekarno, Presiden Indonesia, dan D. Macapagal Presiden Filipina. Meskipun sama-sama tidak setuju, tetapi keduanya memiliki motif politik yang berbeda.

Adalah kepiawaian diplomasi yang kemudian mengubah sikap Stephens. Seusai menghadiri *Commonwealth Parliamentary Association Conference* di Singapura 21 Juli 1961, Stephens, yang menjabat sebagai Ketua Delegasi Borneo dan juga Ketua Ma-

*laysia Solidarity Consultative Committee*, memperlunak sikapnya terhadap ide pembentukan Federasi Malaysia.

Sejumlah sejarawan mencatat, sikap Stephens ini merupakan pengaruh Lee Kuan Yew di satu pihak, dan akibat kurangnya pengalaman diplomasi pemimpin Sabah itu di pihak lain. Stephens kemudian diundang Tunku Abdul Rahman, dengan sambutan bak seorang raja. Sepulang dari Kuala Lumpur, Stephens kemudian mengumumkan persetujuannya secara terbuka terhadap Federasi Malaysia. Seperti yang dikemukakan Larson (1976), dalam pertemuan itu Tunku memberikan sejumlah janji kepada Stephens bahwa hak-hak Sabah dan Sarawak akan terjamin dalam Federasi Malaysia. Selanjutnya Tunku menggambarkan bahwa apabila Sabah dan Sarawak merdeka sendiri, maka kelompok etnik keturunan Cina akan mendominasi baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Tetapi jika kedua negara bagian itu merdeka di bawah Federasi Malaysia, maka Konstitusi Malaysia nanti akan memberikan *special position of indigenous races*.

Tanggal 16 Januari 1962, Lord Cobbold ditunjuk untuk memimpin *the Commission of Enquiry* yang bertugas memantau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak terhadap rencana Malaysia. Tanggal 1 Agustus 1962, temuan komisi itu diumumkan. Pada prinsipnya -- sejauh hak dan kepentingan khusus mereka dilindungi -- bergabung dengan rencana Federasi Malaysia adalah cara yang terbaik bagi rakyat Sabah dan Sarawak.

Untuk melaksanakan rencana itu, maka dibentuk *Inter Governmental Committee* yang dipimpin oleh Lord Landsdowne dan Tun Abdul Razak, dengan anggota utusan Pemerintah Singapura, Sabah dan Sarawak.

Tugas IGC adalah menyusun konstitusi Federasi Malaysia. Pada saat itu lima Partai Politik di Sabah menyampaikan memorandum yang dikenal sebagai *The Twenty Points* (TTP) berisi 20 perkara tentang hak dan kepentingan khusus rakyat Sabah yang harus dilindungi secara konstitusional oleh Federasi Malaysia. Para pemimpin Sarawak menyampaikan memorandum serupa yang berisi 18 perkara. Berdasarkan memorandum itu, maka dibuatlah 37 rekomendasi bagi Sabah dan Sarawak untuk bersama Singapura dan Federasi Malaya membentuk Federasi Malaysia. Selanjutnya, dengan rekomendasi itu, disusunlah *The Agreement of the Federation of Malaysia*, dokumen resmi pembentukan Federasi Malaysia yang ditandatangani oleh Pemerintah Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Inggris. Maka pada 31 Agustus 1963, Federasi Malaysia diproklamasikan.

Meskipun secara terpisah tidak memiliki status hukum yang formal, TTP merupakan *Piagam Kemerdekaan Sabah* dalam Federasi Malaysia. Oleh karena itu, rakyat Sabah menganggap TTP sebagai *the basis of federal-states relations*.

### *Kemerdekaan Singapura*

Kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman untuk melepaskan Singapura dari Federasi Malaysia 9 September 1965 merupakan pelanggaran terbesar terhadap *Malaysia Agreement*. Di sisi lain, peristiwa itu merupakan preseden bagi Sabah dan Sarawak. Jika Singapura dapat lepas dari Malaysia, mengapa Sabah dan Sarawak tidak? Sedangkan Singapura, Sabah dan Sarawak juga sama-sama menandatangani *Malaysia Agreement* sebagai dasar hukum resmi Federasi Malaysia.

Para pakar hukum dan analisis politik menilai, pelanggaran terhadap *Malaysia Agreement* yang dilakukan para pemimpin Federal adalah manifestasi dari kebijaksanaan politik, ekonomi dan sosial budaya Kuala Lumpur terhadap Singapura, Sabah dan Sarawak.

Apabila Singapura tetap merupakan bagian dari Federasi Malaysia, maka tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan dinamika ekonomi masyarakat Cina Singapura akan mengancam kelestarian ketuanan puak Melayu. Sebaliknya, meskipun jumlah penduduk non-muslim di Sabah dan Sarawak cukup besar, mereka tetap akan dikendalikan oleh Federal karena tingkat pendidikan dan ekonominya masih rendah, ditambah dengan langkanya pengalaman politik para pemimpin negeri itu.

Pada saat Singapura diberi kemerdekaan pada 9 September 1965, Donald Stephens yang menjabat Menteri Federal Urusan Hal-Ekwal Sabah, dan Ketua *Sabah Alliance* bermaksud meninjau kembali Federasi Malaysia. Dengan keluarnya Singapura -- salah satu penanda tangan *Malaysia Agreement* -- berarti dasar hukum pembentukan Federasi Malaysia itu cacat secara hukum. Oleh karena itu diperlukan perjanjian yang baru.

### *Intervensi Politik Federal*

Untuk meredam manuver politik Stephens, Kuala Lumpur memerlukan orang kuat di Sabah yang pro-Federal. Pilihan jatuh kepada Tun Datu Mustapha yang saat itu menjadi Yang di-Pertua Negeri. Kuala Lumpur kemudian mengutus Syed Kechick untuk membantu Mustapha kembali ke arena politik.

Pada saat Mustapha tidak tunduk sepenuhnya kepada Kuala Lumpur, Federal membujuk Tun Fuad Stephens yang telah masuk Islam untuk bergabung dengan Harris Salleh mendirikan Partai Berjaya. Berjaya kemudian berkuasa, dan Stephen dilantik untuk menjadi *Chief Minister*. Ia tewas dalam kecelakaan Helikopter 53 hari kemudian, dan Harris menggantikannya sebagai *Chief Minister*.

Di bawah Harris, hubungan Federal-Sabah dapat dikatakan mengalami masa kejayaan. Tetapi di peringkat Negara Bagian, pergolakan berjalan terus, karena kebijaksanaan-kebijaksanaan Harris selalu ditentang oleh wakilnya, Joseph Pairin Kitingan. Kitingan kemudian dipecat, tetapi tetap bercokol di panggung politik sebagai anggota DUN independen. Ia kemudian membentuk PBS dan berkuasa di Sabah sejak 1985.

Pemaksaan Kuala Lumpur terhadap penerapan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di Sarawak dan keinginan Federal untuk mengambil alih otoritas Pemerintah Sarawak dalam masalah pertahanan menyebabkan krisis politik Sarawak pada 1966. Ekornya, Kuala Lumpur memberlakukan keadaan darurat, dan PM Malaysia mengambil alih pemerintahan Sarawak dari Stephen Kalong ak Ningkan (SNAP). Jabatan itu kemudian diserahkan kepada Tawi ak Sli (Pesaka), tetapi pengendalian pemerintahan yang sebenarnya berada di tangan wakilnya, Taib Abdul Mahmud. Pesaka kemudian berfusi dengan Bumiputera dan kepemimpinannya diserahkan kepada Abdul Rahman Ya'kub, yang kemudian diestafetkan kepada Abdul Taib Mahmud.

Baik oleh Sabah maupun Sarawak, Kuala Lumpur dinilai terlalu mencampuri urusan politik internal kedua negeri itu, ter-

utama dalam menumbangkan pemerintahan yang tidak seaspirasi dengan Kuala Lumpur. Sejumlah analis menilai, usaha itu juga sedang dilakukan di Sabah dewasa ini. Permasalahannya adalah, kondisi di Sabah sekarang sangat berbeda dengan kondisi di Sarawak pada tahun 1970.

### Faktor-faktor Konflik yang Potensial

Dari pengalaman lebih dari 25 tahun terakhir, apabila Federal tidak mengubah pendekatannya terhadap Sabah dan Sarawak, maka *Federal-States Relations* masih akan tetap terus bergejolak. Sejumlah faktor rawan yang dapat menjadi sumbu ledak konflik terbuka adalah:

1. **Malaysia Agreement dan pemisahan Singapura.** Kegagalan Kuala Lumpur mentaati butir-butir dalam *Malaysia Agreement* akan terus menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntutan dari Sabah dan Sarawak. Sementara pemisahan Singapura menjadi preseden untuk keduanya memisahkan diri;
2. **Isu Malaysianisasi.** Pemaksaan Federal terhadap Agama Islam, Bahasa Melayu dan Ketuanan Puak Melayu akan menimbulkan ketegangan, karena Sabah dan Sarawak menilai pemaksaan itu berarti rekolonisasi atas Sabah dan Sarawak. Masalah ini mengandung unsur sara yang sangat peka di negara multirasial seperti Malaysia;
3. **Federal-States Revenue Sharing:** Ketidakeimbangan distribusi royalti minyak (95% : 5%) antara *Federal States* dan kecilnya bantuan keuangan Federal dinilai sebagai bentuk eksploitasi Semenanjung terhadap Sabah dan Sarawak;

4. **Pemerataan dan Keadilan Sosial.** Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok elit politik dan konglomerat menyebabkan pincangnya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial sehingga rakyat merasa tertekan, yang kemudian menumbuhkan semangat perlawanan;

5. **Dominasi politik Kuala Lumpur yang berlebihan.** Pemaksaan kehendak politik Federal sebagai manifestasi keinginan untuk menguasai Sabah-Sarawak yang melebihi takaran demokrasi sehingga Federal menggunakan alat-alat kekuasaan seperti *Special Branch*, *Militer*, *Anti Corruption Agency* dan *ISA* dan lain-lain akan menimbulkan persepsi bahwa Sabah dan Sarawak adalah jajahan Semenanjung. Termasuk juga pegawai Federal yang pada umumnya berasal dari Semenanjung;

6. **Pendatang "haram".** Mereka merebut kesempatan kerja, dan pelayanan umum-sosial bagi masyarakat setempat. Terdengar isu bahwa Federal sengaja membiarkan masuknya warga muslim Filipina dan Indonesia. Mereka suatu saat kan dinaturalisasikan. Dengan demikian berhak memberi suara dalam Pemilu. Ini akan mengubah perimbangan sara dan bermuara pada bergesernya peta kekuatan politik.

Sejumlah analis memprediksi bahwa gejolak politik yang berkepanjangan di Sabah dan Sarawak -- apabila tidak segera diantisipasi dengan sikap bijaksana baik oleh Federal maupun Pemerintah setempat -- bukan mustahil akan melahirkan konflik terbuka. Sejumlah pengamat ekstrem bahkan berpendapat, bahwa tekanan-tekanan politik Federal atas Sabah kini nyaris berada di atas batas toleransi, sehingga munculnya konfrontasi terbuka tinggal menunggu waktu-

nya saja. Belakangan ini seorang anggota DUN PBS mengusulkan referendum agar rakyat Sabah dapat memilih apakah tetap ingin berada di bawah Federasi Malaysia atau merdeka sendiri.

### Implikasi Terhadap Indonesia dan ASEAN

Sejarah telah mencatat bahwa konflik internal dalam suatu negara akan berimplikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara lain yang teritorialnya berbatasan dengan negara itu.

Menurut sejumlah hipotesa, sekiranya terjadi konfrontasi terbuka antara Sabah dan Federal, maka kelompok bumiputera non-Muslim di Sarawak cenderung akan berpihak kepada Sabah.

Penduduk bumiputera non-Muslim di Sarawak bersatu di bawah label etnisitas Dayak. Hal serupa juga terjadi di belahan Kalimantan. Konflik internal Sinhala-Tamil di Sri Langka telah menumbuhkan sikap solidaritas etnik Tamil di India. Padahal keduanya dibatasi oleh laut. Bagaimana kalau India dan Sri Langka berbatasan secara langsung seperti Indonesia dan Malaysia?

Implikasi lain bagi Indonesia sebagai kawasan penyangga Sabah-Sarawak adalah mengalirnya para pengungsi ke bagian Indonesia. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak politik, sosial dan ekonomi. Pada saat yang sama, sekitar 150.000-200.000 orang Indonesia yang bekerja di sana akan kehilangan pekerjaan. Ini juga akan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi Indonesia, setidaknya-tidaknya para pekerja itu dan keluarga mereka.

Skenario ini agaknya juga akan menimpa Brunei dan Filipina yang berbatasan langsung dengan Sabah. Jika demikian, konflik berkepanjangan antara Sabah-Federal akan berimplikasi pula terhadap kawasan ASEAN. Oleh karena itu semua pihak sesungguhnya berkepentingan akan kestabilan politik di Sabah dan Sarawak.

Dengan demikian, pemerintah Malaysia perlu bersikap lebih bijaksana dalam memperhitungkan faktor-faktor konflik potensial di kawasan itu. Pada saat globalisasi menjadi kenyataan keseharian di seluruh pelosok dunia, gerakan-gerakan anti-Federal di satu sisi dunia ini tentu akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku politik rakyat di belahan dunia lain yang berada dalam kondisi yang sama.

### KEPUSTAKAAN

Abadi, Zakry. *Analisis Pilihanraya Umum '90*. Kuala Lumpur: MYZ Sdn. Bhd., 1990.

Aliran. *ISA Keselamatan Negara*. Aliran Kesedaran Negara (Aliran). P. Pinang: Aliran, 1988.

Ching, Y.L. *Sarawak, The Plot That Failed, 10 March 87-17 April 1987*. Singapore: Summer Times, 1987.

Chung, C.L. *The Constitutional Position of Sabah*.

Commission of Enquiry. *Report of the Commission of Enquiry, North Borneo and Sarawak*. London: Her Majesty Stationery Office, 1962.

Crouch, Harold; Hing, L.K. and Ong, Michael (eds.). *Malaysian Politics and The 1978 Election*. New York: Oxford University Press, 1980.



- Election in Malaysia, A Handbook of Facts and Figures on The Election, 1955-1986.* Kuala Lumpur: NSTP-Research and Information Service, 1990.
- Gomez, E.T. *Money Politics in the Barisan Nasional.* Kuala Lumpur: Forum Publications, 1991.
- Hock, O.Y. *Ethnic Chameleon, Multiracial Politics in Malaysia.* Selangor: Pelanduk Publications, 1991.
- Information Malaysia 1990-1991 Yearbook.* Kuala Lumpur: Berita Harian Publishing Sdn. Bhd., 1991.
- Insan. *Logging Against The Native of Sarawak.* Petaling Jaya, Selangor: Insan, 1989.
- Jackson, James C. *Sarawak, Satu Kajian Ilmu Alam Tentang Sebuah Negeri yang Sedang Membangun.* Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, 1968.
- Jayum, J.A. *The Serawak State Election of 1987: The Dayakism Factor.* Kuala Lumpur: Jawan A Jayum, 1987.
- Johari, H.J., Y.M. and Sidhu, b.S. (eds.). *Urbanisation and Development, Prospects and Policies for Sabah Beyond 1990.* Kota Kinabalu: IDS, 1989.
- Jomo, K.S. *Masyarakat Malaysia, Cabaran Sosial Ekonomi.* Selangor: Insan, 1991.
- Kitingan, J.G. *The Twenty Points: The Basis of Federal-State Relations.* Kota Kinabalu: IDS, 1988.
- *The Political Economy of Federal-State Relations (The Case for Fair Revenue Sharing).* Kota Kinabalu: IDS, 1988.
- Kitingan, J.G. and Ongkili, J.M. (eds.). *Sabah, 25 Years Later 1963-1988.* Kota Kinabalu: IDS, 1989.
- Larson, B.R. *The Politics of Federalism.* Singapore: Bruce Ross-Larson, 1976.
- Liegh, M.B. *The Rising Moon, Political Change in Sarawak.* Sidney: Sidney University Press, 1974.
- Lingenfelter, S.G. (ed.). *Social Organization of Sabah Societies.* Kota Kinabalu: Sabah Museum and State Archives, 1990.
- Raffaele, Paul. *Harris Salleh of Sabah.* Hong Kong: Condor Publishing Pty., Co., 1986.
- Sabah Time*, 4 Maret 1990.
- Sahabat Alam Malaysia. *The Battle for Sarawak's Forest.* P. Pinang: Sahabat Alam Malaysia and World's Rainforest Movement, 1989.
- Searle, P. *Politics in Sarawak, 1970-1976, The Iban Prospective.* London: Oxford University Press, 1983.
- Talib, Kushairie. *PBS, Keluar Membela Maruah.* Kuala Lumpur: Goldana Corp. Sdn. Bhd., 1991.
- Wariya, Chamil. *UMNO Era Mahathir.* Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1988.

BHAKTI DHARMA - WASPADA


 POLISI  
 KEPOLISIAN RI